

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan ini tidak terlepas dari suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar menunjukkan suatu tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya, guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik perlu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dalam mempraktikkan akuntabilitas dan keterbukaan atau transparansi informasi desa.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Dalam hal pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin 2012).

Buruknya infrastruktur pembangunan jalan raya di seluruh wilayah di

kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT turut dikeluhkan oleh seluruh masyarakat lantaran kondisinya sangat memprihatinkan. Salah satunya, ruas jalan yang kini mengalami kerusakan sangat parah adalah jalur dari kampung Lewe, Desa Rana Masak, Kecamatan Borong, menuju kampung Metuk desa Golo Ndele Kecamatan Kota Kumba Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Kondisinya saat ini rusak parah dan tidak layak untuk dilewati kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Rion warga desa Golo Ndele ditemui media *Victorynews.id* di lokasi menyampaikan kerusakan jalan tersebut sudah lama. Bagi pengendara roda dua maupun roda empat Butuh nyali kuat dan perlu hati-hati untuk melintasi jalan tersebut. Kendati dengan jalan rusak tersebut, dirinya meminta Pemkab Manggarai Timur mencarikan solusi agar jalan rusak tersebut. Kerusakan jalan tersebut menyebabkan ekonomi masyarakat terpuruk karena banyak hasil bumi yang harus dijual ke Borong namun terhambat infrastruktur jalan tidak mendukung.

Permasalahan yang dihadapi oleh desa Rana Masak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa

Dalam hal ini penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum tersedia. Padahal transparansi dalam pembangunan diperlukan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat desa dan pemerintah desa.

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya,

serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu (Shende dan Bennett, 2004 dalam Nahrudin, 2017).

2. Tidak menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa

Dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat atas tercapainya tujuan pengelolaan dana desa dan laporan pertanggungjawabannya tidak ada.

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Scott, 2000: Mulgan, 2003) dalam (Mahayani, 2017).

3. Partisipasi masyarakat rendah

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diperlukan agar masyarakat sebagai subjek pembangunan terlibat dan dapat mengontrol langsung proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah di lapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran (Rahayu, 2010).

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuka kesempatan

kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan seseorang meningkat, maka orang tersebut akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan primernya sehingga tingkat kesejahteraannya akan meningkat.

5. Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya masyarakat tidak mampu untuk bersekolah akan meningkatkan peluang masyarakat untuk melanjutkan sekolah sehingga akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat

Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah Desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat sama paa huruf (p) diatur bahwa kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa. Jika aturan tentang keterbukaan informasi ini diaplikasikan dengan praktik dalam Pemerintahan Desa, maka pemerintah Desa harus menunjuk PPID agar Pemerintah Desa dapat dengan baik

melakukan pengelolaan terhadap informasi yang terkait dengan program, kegiatan, kebijakan, serta berbagai dokumentasi lain tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pengelolaan informasi yang baik, dipastikan pelayanan informasi terhadap masyarakat desa juga akan baik pula, sehingga kewajiban-kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur oleh UU Desa dapat dijalankan dengan maksimal.

Diketahui bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang mana pemerintah benar-benar menunjukkan suatu tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat serta bagaimana keterlibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Akan tetapi, masih ada beberapa desa yang belum sejahtera baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi yang masih rendah.

Penelitian ini didukung oleh beberapa referensi literatur penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi. Penelitian yang dilakukan Oktavia (2020), hasil uji t secara parsial variabel akuntabilitas dan variabel transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Dan hasil uji koefisien determinasi variabel akuntabilitas, transparansi dan berkontribusi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian lainnya yang dilakukan Prayogi (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan kepada pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Balapulang Wetan. Penelitian yang dilakukan Hikmah (2020), hasil penelitiannya bahwa secara parsial variabel

akuntabilitas dan responsif berpengaruh signifikan atau positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan variabel transparansi yang berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan secara simultan variabel transparansi, akuntabilitas dan responsif berpengaruh signifikan atau positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indarti (2020), hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa, baik secara parsial atau simultan. Penelitian lainnya yaitu Putra (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Putri (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan secara parsial, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hasil analisis dari beberapa penelitian terdahulu mempunyai kesimpulan atau hasil penelitian yang berbeda-beda. Maka, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi hasil jika diterapkan pada sampel yang berbeda. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan lokasi penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu desa Banguntapan dengan penduduk terbanyak dengan tingkat ekonomi tertinggi dibanding desa lainnya serta

pekerjaan dan tingkat pendidikan masyarakatnya yang bervariasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi Informasi Publik, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
2. Apakah transparansi informasi publik desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.3 Batasan Masalah

1. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan variabel:
 - Akuntabilitas pengelolaan dana desa (x1) dengan item indikator: tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa, adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, dan adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa
 - Transparansi informasi publik (x2) dengan item indikator: penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.

- Partisipasi masyarakat (x3) dengan item indikator: keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penerimaan dan pemanfaatan hasil, dan keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil.
 - Kesejahteraan masyarakat (y) dengan item indikator: kondisi hunian yang layak, kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan ekonomi dan kepemilikan aset
2. Penelitian dilakukan pada Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui apakah transparansi informasi publik desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
3. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat pada pemerintahan desa, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan arti penting dari penelitian, apa yang diteliti dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan. Yang mana teori-teori tersebut menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian

terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang, dan keterbatasan penelitian